
Formalisasi Industri Pengolahan di Kabupaten Kebumen: Sebuah Tantangan

Dodi Satriawan

Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara

dodisatriawan@bps.go.id

Abstract

The purpose of this study is to examine the challenges of manufacturing formalization in Kebumen Regency. This study uses secondary data from BPS, the 2016 Economic Census-Continued, as a data source. The data analysis method used in this study is descriptive analysis. The analysis was carried out through cross tabulation to obtain an overview of the characteristics and challenges of manufacturing formalization in Kebumen Regency. The results of the study indicate that the challenges of manufacturing formalization can be seen from the legal, social, economic and management dimensions. Some of these challenges include business legality, low level of education of entrepreneurs, low access to bank credit, lack of partnerships, lack of business development plans, and low computer and internet use.

Keywords: *formalization, manufacturing, informal sector.*

Pendahuluan

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten yang dikembangkan dalam rangka mendukung pembangunan sektor industri pengolahan. Rencana pengembangan ini tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen tahun 2011-2031. RTRW Kabupaten Kebumen menyatakan bahwa kawasan peruntukan industri pengolahan meliputi 8 wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Buayan, Petanahan, Kebumen, Alian, Karanggayam, Prembun, Sempor, dan Gombang (Bappeda, 2012).

Penetapan beberapa kecamatan sebagai kawasan industri pengolahan di Kabupaten Kebumen mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi. Produk-produk yang dihasilkan berkembang menjadi Produk Unggulan Daerah (PUD) dan produk industri lain yang memiliki potensi dan nilai ekonomis tinggi. Kabupaten Kebumen memiliki 11 PUD yang meliputi gula kelapa, emping melinjo, lanting, batik, sabut kelapa, keset, anyaman pandan, anyaman bambu, tas, peci, genteng, minyak atsiri, dan batu mulia.

Keberadaan produk-produk unggulan di Kabupaten Kebumen berdampak positif bagi perekonomian Kabupaten Kebumen secara keseluruhan. Hal ini tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan bahwa pada tahun 2017, industri pengolahan menjadi sektor terbesar kedua penyumbang Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kebumen, dengan kontribusi sebesar 19,96 persen. BPS juga mencatat bahwa pada tahun 2017, sektor industri pengolahan mampu tumbuh sebesar 5,55 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen yang hanya 4,89 persen (BPS Kebumen, 2018).

Industri pengolahan juga menjadi sektor penyerap tenaga kerja yang relatif tinggi di Kabupaten Kebumen. Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) yang diselenggarakan oleh BPS, sektor industri pengolahan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 149.254 orang, atau sebesar 4,24 persen dari total tenaga kerja industri pengolahan di Jawa Tengah. SE2016 juga menunjukkan bahwa Kebumen merupakan Kabupaten dengan jumlah perusahaan industri pengolahan terbanyak di Provinsi Jawa Tengah,

yaitu sebanyak 65.773 perusahaan atau sebesar 6,48 persen dari total perusahaan industri pengolahan di Jawa Tengah (BPS Jawa Tengah, 2018).

Relatif tingginya daya serap tenaga kerja menunjukkan bahwa industri pengolahan merupakan sektor yang potensial dari sisi makro ketenagakerjaan di Kabupaten Kebumen. Namun potensi ini belum diikuti dengan nilai balas jasa/upah yang diterima pekerja industri pengolahan di Kabupaten Kebumen. SE2016 membuktikan bahwa Kebumen merupakan Kabupaten dengan rata-rata nilai balas jasa/upah terendah keempat di Jawa Tengah. Rata-rata nilai balas jasa/upah pekerja industri pengolahan di Kabupaten Kebumen tercatat sebesar 11,26 juta rupiah per tahun. Nilai ini jauh dari rata-rata nilai balas jasa/upah di Jawa Tengah yang sebesar 21,04 juta rupiah per tahun (BPS Jawa Tengah, 2018).

Kondisi di atas secara tidak langsung menggambarkan bahwa kinerja sektor industri pengolahan di Kabupaten Kebumen belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh industri pengolahan di Kabupaten Kebumen lebih cenderung berjalan pada tataran ekonomi informal. *International Labor Organization (ILO)* menyatakan bahwa ekonomi informal adalah semua kegiatan perekonomian yang menurut hukum atau praktiknya tidak termasuk atau tidak dicakup secara memadai oleh pengaturan formal. Konsep dari *ILO* ini menggambarkan bahwa penentuan formal-informal suatu perusahaan dapat dilihat dari aspek hukum, yakni status badan usaha (ILO, 2012).

Informalitas perusahaan industri pengolahan di Kabupaten Kebumen terkonfirmasi oleh hasil SE2016 yang menyatakan bahwa 98,24 persen perusahaan industri pengolahan di Kabupaten Kebumen tidak memiliki badan usaha. Adapun sisanya, sebesar 1,76 persen perusahaan telah berbadan

usaha, baik berupa Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap (CV)*, Firma, Koperasi, Yayasan, ataupun Ijin khusus dari instansi yang berwenang (BPS Jawa Tengah, 2018). Kondisi ini menggambarkan bahwa mayoritas perusahaan industri pengolahan di Kabupaten Kebumen bergerak pada sektor informal.

Pada tahun 2016, *International Finance Corporation (IFC)* melakukan studi penelitian pasar terhadap Usaha Kecil Mikro (UKM) di Indonesia. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa informalitas dapat menjadi penghalang kerjasama antara perusahaan besar dengan UKM, dengan mengeluarkannya dari partisipasi aktif rantai nilai sebagai produsen, pemasok, dan penyedia jasa. Menurut *IFC*, informalitas juga dapat menghambat UKM mendapatkan order dari pemerintah. Selain itu, hasil kajian *IFC* juga menyatakan bahwa informalitas juga dapat menyebabkan bank membatasi akses UKM terhadap kredit bank dan fasilitas finansial lainnya (Rubin Japhta, et al, 2016).

Hasil-hasil penelitian *IFC* di atas membuktikan bahwa informalitas, dari aspek hukum, merupakan penghalang bagi suatu perusahaan dalam memperoleh akses terhadap permodalan, fasilitas keuangan, dan jaminan sosial/ketenagakerjaan. Hal-hal inilah yang menyebabkan perusahaan informal cenderung rentan ketika terjadi guncangan ekonomi, semakin terpinggirkan, dan relatif sulit mengalami kemajuan. Oleh karena itu, formalisasi perusahaan merupakan salah satu langkah penting yang dapat dijalankan untuk mendekatkan perusahaan dengan seluruh akses baik permodalan, perbankan, ataupun jaminan sosial/ketenagakerjaan.

Secara detail, identifikasi dimensi dan indikator formalisasi suatu usaha/perusahaan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Identifikasi dan Indikator Formalisasi Usaha/Perusahaan

No.	Dimensi	Indikator
1	Hukum (Rubin Japhta, et al, 2016).	Ijin usaha, pengakuan pemerintah, keamanan, intervensi, retribusi, lokasi
2	Ekonomi (Unni, 2018)	Permodalan, stok barang, kualitas barang, pendapatan, akses perbankan, skala usaha

3	Sosial (Williams, Shahid et.al. 2016)	Tingkat pendidikan, hubungan kerja, jaminan sosial, jumlah tenaga kerja
4	Manajemen (Frempong, 2009)	Pembukuan, perencanaan, teknologi, jam kerja, standar keselamatan kerja, evaluasi

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui tantangan formalisasi suatu perusahaan. Selama ini, studi ekonomi informal cenderung ditinjau dari perspektif tenaga kerja. Adapun studi ekonomi informal dari perspektif perusahaan relatif belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan formalisasi industri pengolahan di Kabupaten Kebumen dari dimensi hukum, ekonomi, sosial, dan manajemen.

Bahan dan Metode

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu hasil SE2016-Lanjutan yang dilaksanakan pada tahun 2017. Pada dasarnya, SE2016-Lanjutan merupakan bagian dari tahapan SE2016 berupa pendataan sampel untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan sensus lengkap untuk Usaha Menengah dan Besar (UMB), kecuali untuk kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (BPS, 2019b).

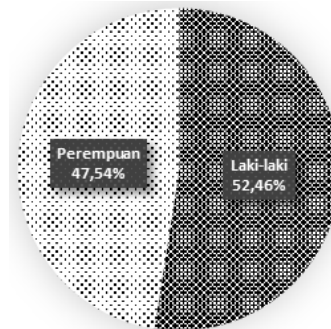
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan tabulasi silang (*cross tabs*) antar variabel. Analisis deskriptif merupakan analisis paling sederhana, namun memiliki kemampuan menerangkan cukup kuat untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh gambaran industri pengolahan di Kabupaten Kebumen. Adapun analisis tabulasi silang dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan formalisasi industri pengolahan di Kabupaten Kebumen.

Hasil dan Pembahasan

Secara umum, berdasarkan skala usaha, suatu unit usaha/perusahaan industri pengolahan dapat dikelompokkan ke dalam dua

kategori. Kedua kategori tersebut adalah Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB). Pengelompokan ini didasarkan pada jumlah tenaga kerja yang dimiliki perusahaan tersebut. BPS mendefinisikan UMK sebagai perusahaan yang memiliki jumlah tenaga kerja kurang dari 20 orang, sedangkan UMB adalah perusahaan yang mempunyai tenaga kerja lebih dari atau sama dengan 20 orang (BPS, 2019a).

Hasil SE2016-Lanjutan mencatat bahwa secara keseluruhan Kabupaten Kebumen memiliki 65.773 perusahaan yang bergerak di sektor industri pengolahan. Berdasarkan skala usaha, sebesar 99,69 persen diantaranya merupakan UMK dan sisanya adalah UMB. Hal ini menggambarkan bahwa UMK menjadi penopang utama perekonomian sektor industri pengolahan di Kabupaten Kebumen.



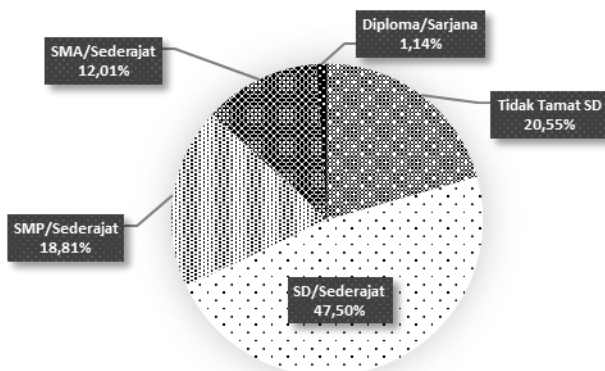
Sumber: Hasil Pengolahan SE2016-Lanjutan

Gambar 1. Persentase Perusahaan Industri Pengolahan di Kabupaten Kebumen berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa pengusaha/penanggungjawab usaha industri pengolahan di Kabupaten Kebumen sebenarnya relatif berimbang antara laki-laki dan perempuan. Namun memang laki-laki masih sedikit mendominasi dengan persentase 52,46 persen (Gambar 1).

Sementara itu berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar

pengusaha/penanggungjawab usaha industri pengolahan di Kabupaten Kebumen berpendidikan rendah. Hampir separuh, yakni sekitar 47,50 persen pengusaha/penanggungjawab usaha industri pengolahan berpendidikan SD/Sederajat. Bahkan masih terdapat sekitar 20,55 persen pengusaha yang tidak tamat SD. Adapun persentase pengusaha/penanggungjawab usaha yang berpendidikan tinggi masih relatif kecil, yakni 12,01 persen untuk SMA/Sederajat dan 1,14 persen untuk diploma/sarjana (Gambar 2).



Sumber: Hasil Pengolahan SE2016-Lanjutan

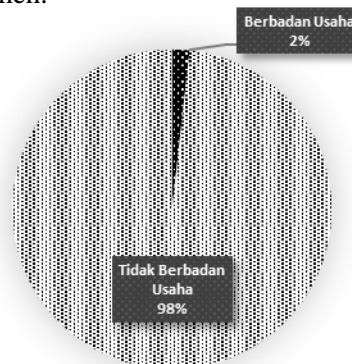
Gambar 2. Persentase Perusahaan Industri Pengolahan di Kabupaten Kebumen berdasarkan Tingkat Pendidikan Pengusaha

Dengan demikian, gambaran umum dari industri pengolahan di Kabupaten Kebumen adalah masih didominasi oleh skala mikro dan kecil. Selain itu dari perspektif pengusaha/penanggungjawab usaha, sebagian besar adalah laki-laki dan berpendidikan rendah. Potret ini secara tidak langsung berdampak pada produktivitas industri pengolahan di Kabupaten Kebumen.

Tantangan Formalisasi dari Dimensi Hukum

Pada Gambar 3 menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan industri pengolahan di Kabupaten Kebumen tidak berbadan usaha, dengan persentase sebesar 98,24 persen. Adapun sisanya, yakni sebesar 1,76 persen perusahaan industri pengolahan telah berbadan usaha. Beberapa jenis badan usaha yang dimiliki antara lain PT, CV, Firma, Koperasi, Yayasan, dan Ijin khusus dari instansi berwenang.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam formalisasi industri pengolahan di Kabupaten Kebumen.



Sumber: Hasil Pengolahan SE2016-Lanjutan

Gambar 3. Persentase Industri Pengolahan di Kabupaten Kebumen berdasarkan Kepemilikan Badan Usaha

Ketidakterdapatnya badan usaha akan menyulitkan perusahaan mendapatkan akses permodalan ataupun fasilitas perbankan untuk memajukan usahanya. Bagaimanapun juga, legalitas suatu perusahaan merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melekatkan atau mengesahkan suatu perusahaan dimata masyarakat. Legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan. Berbekal legalitas, perusahaan tersebut akan dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen yang sah di mata hukum. Legalitas ini sangat bermanfaat sebagai sarana perlindungan hukum, sarana promosi, bukti kepatuhan terhadap hukum, mempermudah mendapatkan suatu proyek dan mempermudah pengembangan usaha (Ratnawati Ayu, 2017).

Terkait dengan legalitas usaha, terdapat suatu hasil kajian menarik yang dilakukan oleh Yohanna M.L. Gultom berdasarkan Survei Industri Besar Sedang tahun 2009 dan Survei Industri Mikro Kecil tahun 2010 yang diselenggarakan oleh BPS. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mikro dan kecil yang tidak memiliki legalitas usaha menanggung biaya transaksi paling kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara legal, baik yang berskala mikro dan kecil, maupun menengah dan besar (Gultom, 2014). Hal inilah yang menurut

Yohanna M.L. Gultom, membuat perusahaan cenderung enggan melegalkan status usahanya.

Keengganan perusahaan melegalkan status usahanya juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Hal ini ditunjukkan oleh studi yang dilakukan oleh Hidayat terhadap usaha/perusahaan mikro, kecil, dan menengah di wilayah Malang Raya. Hasil studi menyatakan bahwa yang menyebabkan usaha/perusahaan enggan melegalkan status usahanya adalah banyaknya jenis perizinan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan suatu kegiatan usaha, persyaratan yang belum sesuai dengan karakteristik usaha khususnya usaha mikro, kurangnya sosialisasi dan belum adanya konsekuensi yang jelas dari pemerintah dengan dimilikinya badan hukum (Hidayat, 2012).

Dengan demikian, pemerintah harus merumuskan kebijakan yang dapat mengurangi biaya transaksi, bukan sekedar mengurangi berbagai biaya resmi dan menyederhanakan berbagai prosedur. Program formalisasi usaha juga harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan masalah yang dihadapi yaitu banyaknya jenis perizinan yang harus dipenuhi dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Pemerintah juga harus melakukan sosialisasi *best practice* formalisasi usaha yang telah disusun dengan memperhatikan semua faktor yang mempengaruhi efektifitas sistem pelayanan. Upaya-upaya ini diharapkan dapat menarik minat perusahaan melegalkan status usahanya.

Tantangan Formalisasi dari Dimensi Sosial

Formalisasi perusahaan dari dimensi sosial dapat dilihat dari dua indikator, yakni tingkat pendidikan dan jumlah tenaga kerja. Tingkat pendidikan yang dimaksud dalam hal ini adalah tingkat pendidikan pengusaha/penanggungjawab usaha. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada subbahasan gambaran umum, sebagian besar perusahaan industri pengolahan di Kabupaten Kebumen didominasi oleh UMK. Hal ini berarti dari sisi tenaga kerja, perusahaan industri pengolahan di Kabupaten Kebumen sebagian besar memiliki tenaga kerja kurang dari 20 orang.

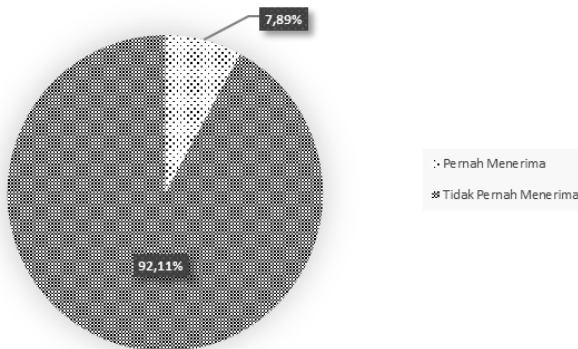
Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas pengusaha/penanggungjawab usaha industri pengolahan di Kabupaten Kebumen berpendidikan relatif rendah. Sebanyak 47,50 persen pengusaha/penanggungjawab usaha industri pengolahan berpendidikan SD/Sederajat, dan masih terdapat sekitar 20,55 persen pengusaha yang tidak tamat SD. Adapun persentase pengusaha/penanggungjawab usaha yang berpendidikan tinggi masih relatif kecil, yakni 12,01 persen untuk SMA/Sederajat dan 1,14 persen untuk diploma/sarjana (BPS Jawa Tengah, 2018).

Dengan demikian, dimensi sosial ini menjadi tantangan formalisasi industri pengolahan di Kabupaten Kebumen. Relatif sedikitnya jumlah tenaga kerja tentu berpengaruh pada *output* industri yang dihasilkan. Selain itu, dengan dominannya pengusaha berpendidikan rendah akan menghambat inovasi-inovasi produk industri. Rendahnya tingkat pendidikan secara tidak langsung berdampak pada pendapatan atau tingkat kesejahteraan para pelaku usaha industri pengolahan termasuk pekerja industri pengolahan di Kabupaten Kebumen. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Global Entrepreneurship Monitor* di Afrika Selatan. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa tingkat pendidikan yang semakin rendah sejak tahun 2006 ke tahun 2011 berdampak kepada semakin rendahnya aktivitas kegiatan usaha di Afrika Selatan (*Global Entrepreneurship Monitor (GEM)*, 2011). Hasil ini senada dengan penelitian yang dilakukan di daerah Mdatsane, Afrika Selatan yang membuktikan bahwa pengalaman bekerja, tingkat pendidikan dan lamanya bisnis secara bersama-sama berdampak signifikan terhadap penghasilan usaha tersebut (Chiliya, 2012).

Tantangan Formalisasi dari Dimensi Ekonomi

Formalisasi perusahaan dari dimensi ekonomi dapat dilihat dari tiga indikator, yakni skala usaha, akses terhadap kredit perbankan, dan keberadaan jalinan kemitraan. Skala usaha dapat dikategorikan menjadi mikro, kecil, menengah, dan besar. Sebagaimana telah

diuraikan sebelumnya pada subbahasan gambaran umum, perusahaan industri pengolahan di Kabupaten Kebumen didominasi oleh perusahaan dengan skala mikro dan kecil, yakni sebesar 99,69 persen.



Sumber: Hasil Pengolahan SE2016-Lanjutan

Gambar 4. Persentase Industri Pengolahan di Kabupaten Kebumen berdasarkan Akses terhadap Kredit Perbankan

Gambar 4 di atas menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan industri pengolahan di Kabupaten Kebumen tidak pernah menerima kredit perbankan, dengan persentase sebesar 92,11 persen. Kredit perbankan merupakan salah satu fasilitas finansial yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menggerakkan roda kegiatan usaha. Kredit perbankan juga dapat digunakan oleh perusahaan yang ingin memperbesar skala usaha, baik dengan ekspansi usaha, penambahan modal, ataupun diversifikasi produk.

Keenganan perusahaan menerima kredit perbankan tentu disertai beberapa alasan. Beberapa hal yang dijadikan alasan perusahaan tidak menerima kredit perbankan antara lain tidak tahu prosedur, prosedur sulit, tidak ada agunan, suku bunga tinggi, usulan kredit ditolak, dan alasan lainnya. Hasil SE2016-Lanjutan menunjukkan bahwa sebagian besar alasan perusahaan industri pengolahan di Kabupaten Kebumen tidak menerima kredit perbankan adalah suku bunga tinggi dan tidak ada agunan (BPS Jawa Tengah, 2018).

Terkait ketiadaan agunan sebagai alasan perusahaan tidak menerima kredit perbankan sesuai dengan penelitian yang dilakukan terhadap 120 UMK di Kabupaten Brebes. Hasil

penelitian tersebut membuktikan bahwa kepemilikan aset sebagai jaminan kredit memberikan dampak pada probabilitas akses keuangan pinjaman UMK di Kabupaten Brebes. Semakin besarnya jaminan dalam pengajuan rencana kredit, maka probabilitas akses keuangan penjamin akan semakin tinggi (Kurniawan, 2012). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan terhadap 384 UMK di Sumatera Barat. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa peluang sebuah aplikasi kredit yang diajukan UMK ditolak akan berkurang dari 59,9% menjadi 11,7% jika UMK tersebut memiliki jaminan yang cukup (Marta & Satria, 2016).

Kemitraan merupakan kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Kemitraan ini sangat penting bagi perusahaan industri pengolahan, baik sebagai mitra dalam hal suplai bahan baku maupun pemasaran produk industri.



Sumber: Hasil Pengolahan SE2016-Lanjutan

Gambar 5. Persentase Industri Pengolahan di Kabupaten Kebumen berdasarkan Keberadaan Jalinan Kemitraan

Gambar 5 di atas menggambarkan bahwa sebagian besar perusahaan industri pengolahan di Kabupaten Kebumen tidak menjalin kemitraan dengan perusahaan lain, dengan persentase sebesar 90,23 persen. Hanya terdapat sekitar 9,77 persen perusahaan yang menjalin kemitraan dengan perusahaan lain. Kemitraan dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, antara lain penyediaan uang/barang modal, pengadaan bahan baku, pemasaran,

bimbingan/pelatihan, dan jenis kemitraan lainnya. Berdasarkan hasil SE2016-Lanjutan, jenis kemitraan yang banyak dilakukan oleh perusahaan industri pengolahan di Kabupaten Kebumen adalah pemasaran dan pengadaan bahan baku, masing-masing sebesar 41,40 persen dan 40,14 persen (BPS Jawa Tengah, 2018).

Dengan demikian, dari dimensi ekonomi, persoalan skala usaha, akses terhadap kredit perbankan, dan keberadaan jalinan kemitraan menjadi tantangan dalam formalisasi industri pengolahan di Kabupaten Kebumen. Oleh karena itu, pemerintah harus membuka seluas-luasnya akses mendapatkan kredit perbankan dan fasilitas finansial lainnya bagi industri pengolahan di Kabupaten Kebumen. Pemerintah juga harus menyusun peta *link and match* antara UMK dengan UMB ataupun dengan pihak lain, agar tercipta kemitraan yang saling menguntungkan, baik dalam hal pemasaran, penyediaan bahan baku, ataupun pemberian bimbingan/pelatihan. Akses kredit perbankan dan jalinan kemitraan yang optimal tentu dengan sendirinya akan mampu meningkatkan skala usaha industri pengolahan di Kabupaten Kebumen.

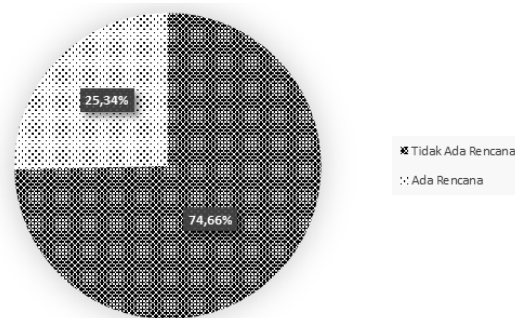
Pentingnya akses kredit perbankan terhadap kemajuan suatu usaha ini sesuai dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Hasil kajian tersebut menyatakan bahwa salah satu sumber masalah yang menghambat perkembangan UMK adalah kurangnya akses pembiayaan usaha terutama dari pihak perbankan. Lebih jauh lagi, kajian tersebut juga merekomendasikan perlunya suatu prioritas kebijakan peningkatan aksesibilitas pembiayaan untuk memperbesar kapasitas UMK, agar mempercepat pembangunan yang berkualitas (Darwin, 2018). Demikian juga dengan pentingnya kemitraan bagi usaha sejalan dengan penelitian yang dilakukan terhadap UMK di Jawa Timur. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemitraan sangat membantu UMK untuk terus berinovasi dan melakukan pengembangan, sehingga produk-produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan

produk lokal lainnya dan produk internasional (Widyani, 2012).

Beberapa hasil kajian di atas membuktikan bahwa aksesibilitas kredit perbankan dan kemitraan sangat penting bagi suatu usaha/perusahaan. Keduanya dapat mendorong kemajuan suatu usaha/perusahaan, baik dalam hal pengembangan inovasi produk maupun peningkatan produktivitas usaha/perusahaan. Hal ini secara tidak langsung tentu akan membantu percepatan pembangunan yang berkualitas.

Tantangan Formalisasi dari Dimensi Manajemen

Formalisasi perusahaan dari dimensi manajemen dapat dilihat dari tiga indikator, yakni keberadaan rencana pengembangan usaha, penggunaan komputer, dan penggunaan internet.



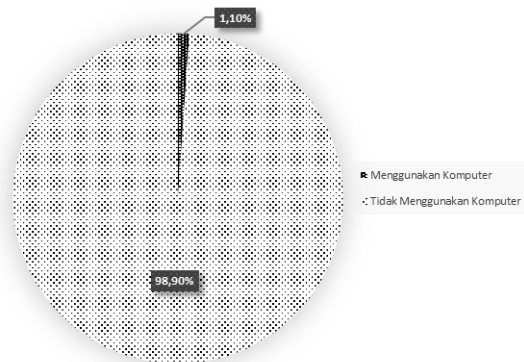
Sumber: Hasil Pengolahan SE2016-Lanjutan

Gambar 6. Persentase Industri Pengolahan di Kabupaten Kebumen berdasarkan Keberadaan Rencana Pengembangan Usaha

Gambar 6 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan industri pengolahan di Kabupaten Kebumen tidak memiliki rencana pengembangan usaha, dengan persentase sebesar 74,66 persen. Setiap perusahaan tentu memiliki alasan yang berbeda-beda mereka memilih untuk tidak memiliki rencana terkait pengembangan usaha. Hasil SE2016-Lanjutan menggambarkan bahwa mayoritas alasan adalah kekurangan modal dan keahlian (BPS Jawa Tengah, 2018).

Gambar 6 juga menunjukkan bahwa terdapat 25,34 persen perusahaan industri

pengolahan yang memiliki rencana pengembangan usaha. Beberapa bentuk rencana pengembangan usaha yang dimiliki antara lain memperluas tempat usaha, membuka cabang, meningkatkan keahlian, diversifikasi produk, dan rencana pengembangan lain.



Sumber: Hasil Pengolahan SE2016-Lanjutan

Gambar 7. Persentase Industri Pengolahan di Kabupaten Kebumen berdasarkan Penggunaan Komputer dan Internet

Gambar 7 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan industri pengolahan di Kabupaten Kebumen tidak menggunakan komputer dan internet dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hanya terdapat 1,10 persen perusahaan yang menggunakan komputer dan 2,62 persen perusahaan yang menggunakan internet. Pada era digital ini, internet menjadi sarana penting bagi perusahaan untuk meningkatkan produktivitasnya. Internet dapat digunakan sebagai media komunikasi, *sharing* informasi, pemasaran, penjualan/pembelian, dan lain-lain. Hasil SE2016-Lanjutan menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan industri pengolahan di Kabupaten Kebumen menjadikan internet sebagai sarana komunikasi, mencari informasi, dan penjualan/pembelian (BPS Jawa Tengah, 2018).

Dengan demikian, dari dimensi manajemen, persoalan rencana pengembangan usaha, penggunaan komputer, dan internet masih menjadi tantangan dalam formalisasi industri pengolahan di Kabupaten Kebumen. Tantangan ini harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Bagaimanapun juga internet adalah media yang relatif efektif bagi perusahaan untuk

memperkenalkan produknya. Hasil kajian yang dilakukan di Kota Makasar menyatakan bahwa pengusaha produk lokal memanfaatkan media internet dengan melakukan *advertising*, *sales promotion*, *direct marketing*, dan *personal selling* terhadap produk-produk mereka di internet karena dapat melakukan pemasaran secara cepat. Hasil kajian tersebut juga menunjukkan bahwa para pengusaha merasakan manfaat yang sangat besar dengan menggunakan media internet dibandingkan secara konvensional karena dapat mengurangi jumlah biaya dan waktu yang dikeluarkan dalam proses penjualan produk lokal (Ahyuna, 2013).

Kesimpulan

Industri pengolahan menjadi salah satu sektor yang menopang pertumbuhan ekonomi dan penyerap tenaga kerja yang relatif tinggi di Kabupaten Kebumen. Hasil SE2016-Lanjutan menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan industri pengolahan di Kabupaten Kebumen masih bergerak dalam skala mikro/kecil dan cenderung informal. Informalitas ini membatasi gerak industri pengolahan dalam meningkatkan produktivitasnya. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya dan kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk terus menggerakkan formalisasi industri pengolahan. Namun, upaya-upaya formalisasi ini menemui menghadapi beberapa tantangan. Tantangan formalisasi industri pengolahan antara lain legalitas usaha, rendahnya tingkat pendidikan pengusaha/penanggungjawab usaha, rendahnya akses terhadap kredit perbankan, minimnya kemitraan, ketiadaan rencana pengembangan usaha, serta rendahnya penggunaan komputer dan internet.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan terkait sektor informal, khususnya di sektor industri pengolahan, agar industri pengolahan Kabupaten Kebumen dapat tumbuh dan terus berkembang.

Daftar Kepustakaan

Ahyuna. (2013). Pemanfaatan Internet sebagai Media Promosi Pemasaran. *Jurnal*

-
- Komunikasi KAREBA*, 2(1), 30–40.
- Bappeda. (2012). Perda Kabupaten Kebumen No 23 Tahun 2012 (Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031). Retrieved from [http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/164253-\[_Konten_\]_Konten D1442.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/164253-[_Konten_]_Konten D1442.pdf)
- BPS. (2019a). *Analisis Daya Saing Usaha Industri Pengolahan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2019b). *Analisis Hasil Se2016 Lanjutan Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS Jawa Tengah. (2018). *Hasil Pendataan Usaha/Perusahaan Industri Pengolahan*. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah.
- BPS Kebumen. (2018). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kebumen menurut Lapangan Usaha 2013-2017*. Kebumen: BPS Kabupaten Kebumen.
- Chiliya, N. (2012). Impact of level of Education and Experience on Profitability of Small Grocery Shops in South Africa. *Journal of Management Economic*, 3(1), 462–470.
- Darwin. (2018). UMKM dalam Perspektif Pembiayaan Inklusif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 26(1), 59–76.
- Frempong, G. (2009). Mobile Telephone Opportunities: The Case of Micro and Small Enterprises in Ghana. *Info*, 11(2), 79–94.
- Global Entrepreneurship Monitor (GEM). (2011). Report on Higher Expectation Entrepreneurship. Retrieved March 19, 2019, from www.agemconsortium.org
- Gultom, Y. M. L. (2014). Explaining The Informal Sector in Indonesia from The Transaction Costs Perspective. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 16(1), 23–38.
- Hidayat, K. (2012). Pengembangan Formalisasi Kehadiran UMKM. *Jurnal Profi*, 9(1), 57–62.
- ILO. (2012). *Perekonomian Informal: Transisi Menuju Formalisasi*.
- Kurniawan. (2012). Faktor yang Mempengaruhi Akses Keuangan Pinjaman Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Brebes. *Journal & Proceeding*, 611–621.
- Marta, J., & Satria, D. (2016). Dampak Jaminan terhadap Peluang Memperoleh Kredit bagi UMKM di Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia (JEPI)*, 16(1), 1–14.
- Ratnawati Ayu. (2017). Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), 136–145.
- Rubin Japhta, Prashant Murthy, Yopie Fahmi, Anastasiya Marina, & Aarti Gupta. (2016). UKM yang dimiliki Wanita di Indonesia: Kesempatan Emas untuk Institusi Keuangan Lokal. International Finance Corporation World Bank Group. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/8496be45-d4d4-4480-a9f5-49c073294b26/SME+Indonesia_Final_Ind.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lj81Vuj
- Unni, J. (2018). Formalization of the Informal Economy: Perspectives of Capital and Labour. *Indian Journal of Labour Economics*, 61(1), 87–103.
- Widyani, W. M. (2012). Pentingnya Pola Kemitraan dalam Rangka Meningkatkan Peran dan Kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Jawa Timur Periode 2006-2011. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 1(1), 1–10.
- Williams, C. C., Shahid, M. S., & Martínez, A. (2016). Determinants of the Level of Informality of Informal Micro-Enterprises: Some Evidence from the City of Lahore, Pakistan. *World Development*, 84, 312–325.
-